

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perhitungan dan pengamatan saat survey lapangan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kerawanan Longsor Lahan dan Mitigasi Bencana berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman” dapat disimpulkan :

1. Tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Prambanan diklasifikasikan kedalam 4 kelas tingkatan yaitu tidak rawan, kurang rawan, rawan dan sangat rawan yang tersebar di seluruh desa di Kecamatan Prambanan. Tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Prambanan didominasi oleh kelas kurang rawan seluas 1628,15 hektar dengan persentase 44,91%. Kerawanan longsor kelas tidak rawan memiliki luas 542,85 hektar dengan persentase 14,97%. Kerawanan longsor pada kelas rawan memiliki luas 1365,85 dengan persentase 37,67%. Sedangkan untuk tingkat kerawanan longsor sangat rawan memiliki luas 88,51 hektar dengan persentase 2,44%.
2. Faktor dominan penyebab longsor lahan ditentukan berdasarkan tabel frekuensi dari validasi data lokasi kejadian, peta kerawanan longsor yang memiliki nilai harkat 4 dan 5 serta peta satuan lahan. Hasil analisis tabel frekuensi terdapat dua faktor dominan penyebab longsor lahan di Kecamatan Prambanan yaitu curah hujan dan jenis tanah.
3. Upaya mitigasi bencana di Kecamatan Prambanan berdasarkan hasil analisis dan survey lapangan dibagi menjadi 2 bentuk yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural lebih pada pembuatan infrastruktur, penanaman tanaman atau vegetasi yang memiliki kemampuan menahan longsor dan memiliki akar yang kuat. fasilitas umum dan alat pendeteksi longsor. Sedangkan mitigasi non struktural lebih menekankan pada peningkatan kapasitas masyarakat yang salah satunya dengan kegiatan sosialisasi, sosialisasi atau *public*

education serta pembuatan peta kerawanan longsor dan peta lokasi shelter evakuasi.

6.2 Saran

1. Data curah hujan dan data penduduk dari instansi Badan Pusat Statistik belum ada data terbaru yaitu hanya tersedia tahun sebelumnya, seperti data tahun 2021 dalam buku tercantum data 2020. Sebaiknya dalam mempublikasikan data statistik kependudukan disesuaikan dengan tahunnya.
2. Alat pendeteksi longsor berupa EWS sebenarnya sudah ada di beberapa desa, namun beberapa tidak aktif dan tidak dapat berfungsi akibat kurangnya perawatan alat. Demikian maka disarankan untuk pihak terkait seperti BPBD, FPRB dan pemerintah desa melakukan sosialisasi terkait manajemen perawatan alat agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
3. Alat EWS memiliki harga yang relatif mahal sehingga untuk pemasangan di setiap desa dan lokasi rawan longsor tidak memungkinkan. Disarankan untuk pihak yang terkait seperti BPBD memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pembuatan alat EWS sederhana dengan harga yang terjangkau.
4. Pelaksanaan sosialisasi di setiap desa masih belum dilakukan secara rutin hanya sekali dalam setahun. Disarankan untuk pemerintah desa atau pihak yang terkait melaksanakan sosialisasi secara berkala terutama pada saat musim penghujan tiba. Sosialisasi dapat berupa materi tentang pengenalan dan penanganan bencana longsor.
5. Penataan tata guna lahan dan penggunaan lahan terutama di kawasan yang rawan longsor atau berada di lereng terjal untuk menghindari ancaman longsor menimpa bangunan rumah warga.
6. Pemerintah desa atau instansi yang terkait memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat tentang bahaya longsor berupa poster atau

tanda peringatan di daerah yang rawan terutama kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi dan sangat tinggi.